

PENGARUH STRUKTUR AUDIT, KETIDAKJELASAN PERAN, DAN KONFLIK PERAN TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH (Studi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat Periode 2019)

THE EFFECT OF AUDIT STRUCTURE, ROLE AMBIGUITY, AND ROLE CONFLICT ON GOVERNMENT INTERNAL AUDITOR PERFORMANCE (Study on Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) in West Java Province Period 2019)

Vannisa Novkalia¹ & Cahyaningsih, S.E., Ak., M.Si.²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹ vannissano@student.telkomuniversity.ac.id, ² cahyaningsih@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Kinerja auditor internal pemerintah yang baik merupakan cita-cita dan tanggung jawab bagi auditor internal pemerintah BPKP sebagai salah satu Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. Adanya peraturan resmi dari kepala BPKP mengenai penugasan auditor untuk meningkatkan peran auditor sesuai kompetensinya, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh struktur audit, ketidakjelasan peran, konflik peran, dan kinerja auditor internal pemerintah, serta membuktikan pengaruh struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran secara simultan dan parsial antara struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran terhadap kinerja auditor internal pemerintah di BPKP Provinsi Jawa Barat Periode 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan yang diukur dengan skala *Likert*. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal pemerintah. Metode pemilihan sampel menggunakan metode sampling jenuh yang berjumlah sebanyak 31 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil pengujian simultan, struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah di BPKP Provinsi Jawa Barat. Hasil pengujian parsial, diketahui bahwa struktur audit berpengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pemerintah, sedangkan ketidakjelasan peran dan konflik peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah.

Kata Kunci: struktur audit, ketidakjelasan peran, konflik peran, dan kinerja auditor internal pemerintah.

ABSTRACT

The good performance of internal government auditors is the ideals and responsibilities of the BPKP's internal auditor as one of the Government Agency Supervisory Apparatus. The existence of official regulations from the head of the BPKP regarding the assignment of auditors to increase the role of auditors according to their competencies, this study is intended to identify the existence of audit structure, role ambiguity, and role conflict on government internal auditors performance.

This study aims to explain the effect of audit structure, role ambiguity, role conflict, and government internal auditors performance, and prove the influence of audit structure, role ambiguity, and role conflict simultaneous and partial effect between audit structure, role ambiguity, and role conflict on government internal auditors performance in the BPKP of West Java Province Period 2019.

This study is qualitative research that is quantified that is measured by the Likert scale. The population in this study is government internal auditors. The sample selection method uses a saturated sampling method, so that there are 31 internal auditor samples obtained. The data analysis technique used is multiple regression analysis.

Based on the results of simultaneous testing, audit structure, role ambiguity, and role conflict on government internal auditors performance in the BPKP of West Java Province. The results of partial testing, it can be seen that the audit structure has a positive and significant effect on the performance of internal government auditors, while the role ambiguity and role conflict do not affect the government's internal auditors performance.

Keywords: *audit structure, role ambiguity, role conflict, and government internal auditor performance.*

1. PENDAHULUAN

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat masyarakat resah karena tidak sesuai harapan mereka, yaitu mengharapkan pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mewujudkan kinerja pemerintah yang baik merupakan tanggung jawab auditor internal pemerintah. Hal ini diperlukan adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern yang baik pula agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kinerja auditor internal adalah prestasi kerja yaitu proses dan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh auditor internal dalam melaksanakan tugas pengawasan (Ruhbaniah, *et al.*, 2017)^[1]. Salah satu lembaga yang bergerak di bidang pengawasan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat. Salah satu fungsinya yaitu, melakukan audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit kepada instansi penyidik dan pemerintah lainnya (BPKP, 2018)^[2]. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh, terdapat adanya keterlambatan penyampaian hasil audit yang baru-baru ini terjadi. Penanganan Kasus Korupsi Penyertaan Modal Pemkot Cimahi hingga sekarang seperti tidak membuahkan hasil. Hal itu karena Kejaksaan Negeri Kota Cimahi masih menunggu hasil audit dari lembaga BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Barat yang tak kunjung diserahkan ke Penyidik yang seharusnya pada akhir Agustus 2018 sudah diserahkan sesuai perjanjian, tetapi hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Barat sampai sekarang belum juga diterima (Asmara, 2018)^[3].

Selain kasus diatas, ada juga kasus lain bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lebih efektif melakukan pengawasan terhadap pembangunan, di tengah naiknya anggaran belanja negara setiap tahunnya. Wapres Jusuf Kalla menyatakan bahwa Indonesia mempunyai lembaga pengawasan yang begitu banyak, ada BPKP, BPK, Inspektorat Jenderal, belum lagi Kejaksaan, Polisi dan KPK. Hal itu berarti dari segi pengawasan tidak kurang, namun perlu sinkronisasi (Ant, 2018)^[4]. Berdasarkan kasus-kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja BPKP yang salah satunya merupakan BPKP Perwakilan Jawa Barat disebabkan oleh kinerja auditor yang tidak sesuai dengan standar pekerja audit dan dianggap tidak menerapkan standar operasional (SOP) dalam melaksanakan audit dan juga perencanaan dan pengawasan pembangunan harus ditingkatkan agar banyaknya anggaran tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut penelitian Ramadika *et al.*, (2014)^[5], struktur audit membantu auditor dalam melakukan audit lebih menjadi terarah, sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor. Staf audit yang tidak mengetahui struktur audit akan mengalami kesulitan dalam audit. Ketidakjelasan peran mengacu pada kurangnya kejelasan mengenai harapan dan metode untuk memenuhi harapan pekerjaan yang dikenal, dan konsekuensi dari kinerja atau peranan tertentu (Agustina, 2009)^[6]. Konflik peran adalah suatu konflik yang timbul karena mekanisme pengendalian birokrasi organisasi tidak sesuai dengan aturan dan kemandirian profesional (Fanani, *et al.*, 2008)^[7].

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut dan karena terdapatnya inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu, maka membuat peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“PENGARUH STRUKTUR AUDIT, KETIDAKJELASAN PERAN, DAN KONFLIK PERAN TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH (Studi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat Periode 2019)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik responden di BPKP pada tahun 2019, menjelaskan struktur audit, ketidakjelasan peran, konflik peran, dan kinerja auditor internal pemerintah, serta membuktikan secara empiris pengaruh struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran secara bersama-sama terhadap kinerja auditor internal pemerintah dan menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kinerja auditor internal pemerintah.

2. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

2.1 Dasar Teori

Struktur Audit

Struktur audit merupakan langkah pendekatan sistematis yang memiliki karakteristik proses dari prosedur audit yang memakai kumpulan alat serta kebijakan audit yang tertata untuk mempermudah seorang auditor menjalankan tugas auditnya (Bowrin, 1998)^[8]. Salah satu fokus terhadap struktur audit adalah pengembangan dalam prosedur dan komunikasi dalam audit (Bowrin 1998:42). Kegiatan yang menggunakan struktur audit adalah salah satu strategi keputusan dalam pengumpulan bukti. Struktur audit yang semakin baik akan membantu auditor dalam pengumpulan bukti sehingga akan berpengaruh terhadap penilaian atas sebuah pendapat audit, sehingga bukti yang kompeten dan relevan dapat terpenuhi guna memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Penggunaan struktur audit dapat membantu auditor dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor (Gayatri dan Suputra, 2016)^[9].

Ketidajelasan Peran

Ketidajelasan peran menurut Kreitner and Kinicki yang diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis (2014:16)^[10], terjadi ketika anggota tatanan peran tidak mampu menyampaikan kepada penerima peran ekspektasi yang mereka miliki atau informasi yang dibutuhkan untuk melakukan peran tersebut, entah itu karena mereka tidak mempunyai informasinya atau karena mereka sengaja menyembunyikannya. Robbins and Judge

yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015:306)^[11], menyatakan bahwa ketidakjelasan peran timbul karena ekspektasi peran tidak dipahami secara jelas dan karyawan tidak yakin apa yang harus dilakukan.

Konflik Peran

Perubahan peran yang dirasakan oleh auditor internal membuat auditor mudah mengalami konflik peran. Konflik peran bisa terjadi ketika terdapat dua perintah berbeda dalam waktu bersamaan dan diantara dua perintah tersebut bertolak belakang (Fanani, *et al.*, 2008). Konflik peran tersebut bisa menyebabkan kualitas pekerjaan bisa menurun karena tidak diikuti dengan konsentrasi tinggi dalam melaksanakan pekerjaan dan juga bekerja menjadi tidak nyaman, ketegangan kerja dan berbagai hal negatif lainnya yang berdampak pada hasil pekerjaan tidak maksimal. Konflik peran dalam hal ini lebih dianggap sebagai bentuk pertentangan dalam diri karyawan yang disebabkan peran yang berbeda yang harus dimainkan dalam waktu bersama (Rosally dan Jogi, 2015)^[12].

Kinerja Auditor Internal Pemerintah

Kinerja auditor merupakan pengerjaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Pengertian kinerja auditor adalah hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya (Gayatri dan Suputra, 2016). Berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003, kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi. Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu entitas, dan merupakan pegawai yang tunduk pada manajemen entitas tempat ia bekerja (Hery, 2017)^[13]. Berdasarkan pengertian kinerja auditor yang dikemukakan oleh para ahli tersebut bila dikaitkan dengan auditor internal, maka diperoleh kesimpulan bahwa kinerja auditor internal adalah prestasi kerja yaitu proses dan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh auditor internal dalam melaksanakan tugas pengawasan (Ruhbaniah, *et al.*, 2017).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Struktur Audit, Ketidakjelasan Peran, dan Konflik Peran terhadap Kinerja Auditor Internal Pemerintah

Kegiatan menguji dan menganalisis dilakukan sebagai acuan terhadap baik dan buruknya mengenai pengaruh struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran secara simultan (bersama) terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Adanya struktur audit dapat meningkatkan kinerja auditor internal pemerintah menjadi lebih baik. Struktur audit berfungsi sebagai petunjuk tentang sesuatu yang harus dilakukan, instruksi yang harus diselesaikan, dan alat-alat untuk penilaian kualitas kerja yang dilaksanakan (Ruhbaniah, *et al.*, 2017). Auditor internal pemerintah yang mengalami ketidakjelasan peran disebabkan sedikitnya informasi yang didapatkan dapat berdampak negatif terhadap kinerjanya. Serupa halnya dengan yang mengalami konflik peran, jika auditor internal pemerintah menerima tugas lebih dari satu secara bersamaan dan mengakibatkan tekanan yang akan berdampak negatif terhadap kinerjanya (Fanani, *et al.*, 2008).

H₁: Struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran berpengaruh simultan terhadap kinerja auditor internal pemerintah.

Pengaruh Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor Internal

Pendekatan struktur audit adalah sebuah pendekatan sistematis terhadap auditing yang dikarakteristikan oleh langkah-langkah penentuan audit, prosedur rangkaian logis, keputusan, dokumentasi, dan menggunakan sekumpulan alat-alat dan kebijakan audit yang komprehensif dan terintegrasi untuk membantu auditor melakukan audit (Bowrin, 1998). Struktur audit meliputi sifat, keluasan, dan waktu audit. Struktur audit harus menentukan secara detail prosedur audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Fungsi struktur audit meliputi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dan instruksi bagaimana hal tersebut harus diselesaikan, alat-alat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian audit, dan penilaian kualitas kerja yang dilaksanakan.

H₂: Struktur audit berpengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pemerintah.

Pengaruh Ketidakjelasan Peran terhadap Kinerja Auditor Internal

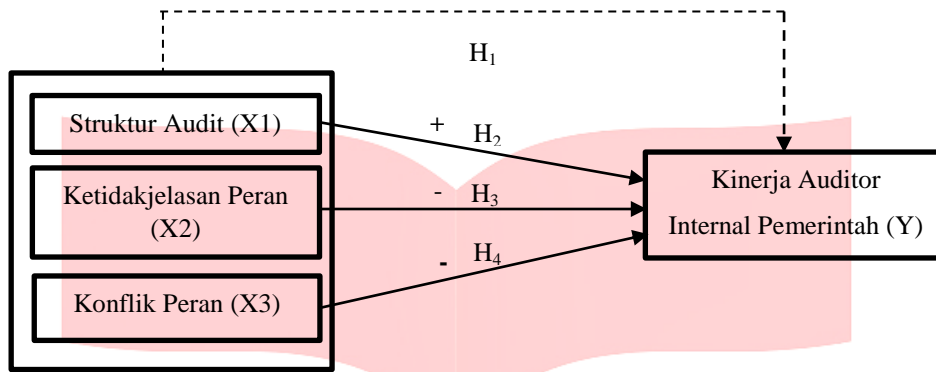
Penelitian Firmanti dan Hanna (2013)^[14] yang mengatakan bahwa seseorang bisa mengalami ketidakjelasan peran jika merasa tidak ada kejelasan sehubungan dengan ekspektasi pekerjaan, seperti kurangnya informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan atau tidak memperoleh kejelasan mengenai deskripsi tugas dari pekerjaan mereka. Oleh karena itu, ketidakjelasan peran dapat mempengaruhi timbulnya penurunan kinerja seseorang karena tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan memuaskan. Ketidakjelasan peran juga dapat menjadi penyebab timbulnya penurunan kesehatan fisik dan psikis karena ketidakjelasan peran merupakan salah satu faktor timbulnya stress kerja akibat dari terhalangnya seseorang dalam menjalankan tugas yang diberikan.

H₃: Ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor internal pemerintah.

Pengaruh Konflik Peran terhadap Kinerja Auditor Internal

Menurut Wibowo (2014:370)^[15], bahwa pelatihan (training) adalah investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia karena pelatihan melibatkan beberapa sumber daya manusia guna mencapai pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan dapat menggunakannya dalam pekerjaan. Konflik peran bisa dijelaskan sebagai konflik internal yang terjadi pada diri seseorang, dan akan terjadi ketika seseorang menghadapi suatu ketidakpastian pekerjaan yang dia harapkan untuk melakukannya, apabila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya (Yasa, 2017)^[16].

H4: Konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor internal pemerintah.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Keterangan :

- > : Pengaruh Parsial
- - - - -> : Pengaruh Simultan

2.3 Metodologi Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diukur dengan skala *Likert*. Sampel dalam penelitian ini adalah auditor internal pemerintah BPKP Provinsi Jawa Barat Periode 2019 yang berjumlah 31 orang. Teknik sampel yang digunakan adalah metode *sampling* jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Kinerja Auditor Internal Pemerintah
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
- X1 : Struktur Audit
- X2 : Ketidakjelasan Peran
- X3 : Konflik Peran
- ϵ : Error

3. PEMBAHASAN

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics									
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
Struktur_Audit	31	5	20	25	676	21.81	.280	1.558	2.428
Ketidakjelasan_Peran	31	6	24	30	856	27.61	.398	2.216	4.912
Konflik_Peran	31	10	25	35	911	29.39	.465	2.591	6.712
Kinerja_Auditor_Internal_Pemerintah	31	12	23	35	954	30.77	.550	3.063	9.381
Valid N (listwise)	31								

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS ver. 23 (2019)

Berdasarkan data dari tabel 1 di atas, dapat diketahui masing-masing nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi untuk N dengan jumlah keseluruhan data 31.

3.2 Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

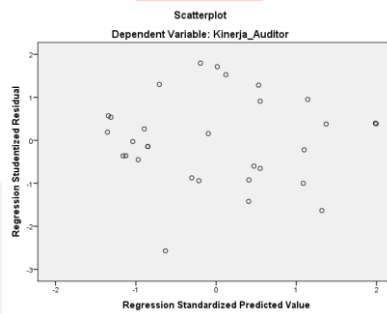
Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	28.045	11.002		2.549	.017		
	Struktur_Audit	.682	.331	.347	2.062	.049	.933	1.072
	Ketidajelasan_Peran	-.573	.313	-.415	-1.832	.078	.516	1.938
	Konflik_Peran	.125	.270	.106	.464	.647	.506	1.975

a. Dependent Variable: Kinerja_Auditor

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS ver. 23 (2019)

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 . Data pada tabel 2, menunjukkan tidak adanya multikolinieritas karena memiliki nilai *tolerance* > 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* < 10 .

Uji Heteroskedastisitas



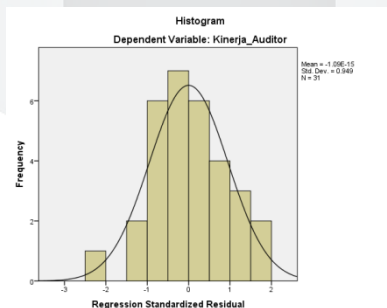
Gambar 2. Scatterplot

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisisnya adalah apabila tidak terdapat pola tertentu atau pola yang jelas, kemudian diikuti dengan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada gambar 2, menunjukkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan Uji *Histogram*, Uji *Normal Probability Plot*, dan Uji *Kolmogorov Smirnov* dengan bantuan *software IBM SPSS Statistics 23*.

1. Uji Histogram

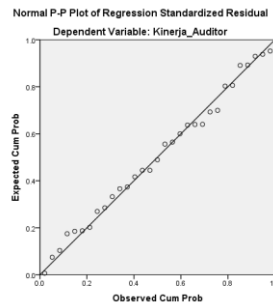


Gambar 3. Histogram

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS ver. 23 (2019)

Berdasarkan gambar 3, uji normalitas pada pendekatan histogram di atas digambarkan bahwa pola berdistribusi normal karena data mengikuti arah garis diagonal serta kurva berbentuk simetri. Hal ini artinya adalah data telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Normal Probability Plot



Gambar 4. Normal Probability Plot

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS ver. 23 (2019)

Berdasarkan gambar 4, uji normalitas pada pendekatan grafik *normal probability plot* di atas digambarkan bahwa data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data atau model-model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

3. Uji Kolmogorov Smirnov

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.58782881
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS ver. 23 (2019)

Apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai di atas 0.05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016:28). Berdasarkan tabel 3, nilai Asymp. Sig 0.200 lebih besar dari 0.05 yang berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan *software IDM SPSS Statistics 23*, berikut penjelasannya:

$$\text{Kinerja auditor internal pemerintah} = 28.045 + 0.682 \text{ Struktur Audit} - 0.573 \text{ Ketidakjelasan Peran} + 0.125 \text{ Konflik Peran} + e$$

Berdasarkan perhitungan tabel 2, penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Konstanta (a) = 28.045

Nilai konstanta sebesar 28.045 dan bertanda positif memiliki hasil yaitu jika variabel struktur audit (X1), ketidakjelasan peran (X2), dan konflik peran (X3) bernilai 0, maka nilai kinerja auditor internal pemerintah (Y) sebesar 28.045.

b. Struktur Audit (X1) terhadap Y

Memiliki nilai positif sebesar 0.682 menyatakan bahwa setiap peningkatan struktur audit sebesar satu satuan dan variabel independen lainnya 0, maka akan menyebabkan struktur audit naik sebesar 0.682 satuan.

c. Ketidakjelasan Peran (X2) terhadap Y

Memiliki nilai negatif sebesar -0.573 menyatakan bahwa setiap peningkatan ketidakjelasan peran sebesar satu satuan dan variabel independen lainnya 0, maka akan menyebabkan ketidakjelasan peran turun sebesar -0.573 satuan.

d. Konflik Peran (X3) terhadap Y

Memiliki nilai positif sebesar 0.125 menyatakan bahwa setiap peningkatan konflik peran sebesar satu satuan dan variabel independen lainnya 0, maka akan menyebabkan konflik peran naik sebesar 0.125 satuan.

Uji Kelayakan Model

Pengujian Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 4. Uji Signifikasi Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	80.514	3	26.838	3.607	.026 ^b
	Residual	200.906	27	7.441		
	Total	281.419	30			

a. *Dependent Variable:* Kinerja_Auditor

b. *Predictors:* (Constant), Konflik_Peran, Struktur_Audit, Ketidakjelasan_Peran

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS ver. 23 (2019)

Apabila pengujian menggunakan nilai probabilitas signifikansi adalah < 0.05 maka H_a diterima yang artinya variabel independen (X) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansi > 0.05 maka H_a ditolak yang artinya variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y).

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui yaitu nilai probabilitas signifikansi $0.026 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka kesimpulannya adalah pengaruh struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran sebagai variabel penjelas memiliki adanya pengaruh simultan terhadap variabel terikat yaitu kinerja auditor internal pemerintah.

Pengujian Parsial (Uji Statistik t)

Berdasarkan perhitungan SPSS pada tabel 2, menunjukkan bahwa:

1. Struktur Audit (X1)

Hasil tingkat signifikan kurang dari 0.05 yaitu 0.049 ($0.049 < 0.05$) yang berarti H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Kesimpulannya adalah variabel independen struktur audit secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen kinerja auditor internal pemerintah.

2. Ketidakjelasan Peran (X2)

Hasil tingkat signifikansi lebih dari 0.05 yaitu 0.078 ($0.078 > 0.05$) yang berarti H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Kesimpulannya adalah variabel independen ketidakjelasan peran secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen kinerja auditor internal pemerintah.

3. Konflik Peran (X3)

Hasil tingkat signifikansi lebih dari 0.05 yaitu 0.647 ($0.647 > 0.05$) yang berarti H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Kesimpulannya adalah variabel independen konflik peran secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen kinerja auditor internal pemerintah.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.535 ^a	.286	.207	2.728

a. *Predictors:* (Constant), Konflik_Peran, Struktur_Audit, Ketidakjelasan_Peran

b. *Dependent Variable:* Kinerja_Auditor_Internal_Pemerintah

Berdasarkan tabel 5, *R Square* memiliki nilai sebesar 0.286 atau 28,6%. Hal ini artinya semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja auditor internal pemerintah sebesar 28,6%, sedangkan sisanya ($100\% - 28,6\% = 71,4\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan dan pengujian data yang telah dikerjakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur audit, ketidakjelasan peran, dan konflik peran sebagai variabel penjelas memiliki adanya pengaruh simultan terhadap variabel terikat yaitu kinerja auditor internal pemerintah pada BPKP Provinsi Jawa Barat Periode 2019.
2. Struktur audit secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen kinerja auditor internal pemerintah.
3. Ketidakjelasan peran secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen kinerja auditor internal pemerintah.
4. Konflik peran secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen kinerja auditor internal pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ruhbaniah, A., Agusdin, & Alamsyah. (2017). Determinan Kinerja Auditor Internal Pada Inspektorat Se-Pulau Lombok. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012*. doi:DOI: 10.24034/j25485024.y2017.v1.i1.2048 p-ISSN 2548 – 298X e-ISSN 2548 – 5024

- [2] BPKP. (2018). *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. Retrieved December 31, 2018, from Kedudukan dan Tupoksi: <http://www.bpkp.go.id/jabar/konten/153/Kedudukan-dan-Tupoksi.bpkp>
- [3] Asmara, T. K. (2018, September 28). *Audit BPKP Perwakilan Jabar Lamban, Penanganan Kasus Korupsi Penyertaan Modal Berjalan Ditempat*. Retrieved from [transaktual.com: http://www.transaktual.com/hukum/594/audit-bpkp-perwakilan-jabar-lamban-penanganan-kasus-korupsi-penyertaan-modal-berjalan-ditempat.html](http://www.transaktual.com/hukum/594/audit-bpkp-perwakilan-jabar-lamban-penanganan-kasus-korupsi-penyertaan-modal-berjalan-ditempat.html)
- [4] Ant. (2018, July 17). *Sindir BPKP, Wapres Minta Lembaga Pengawasan Lebih Efektif*. Retrieved from OKEZONE FINANCE: <https://economy.okezone.com/read/2018/07/17/320/1923394/sindir-bpkp-wapres-minta-lembaga-pengawasan-lebih-efektif>
- [5] Ramadika, A. P., Nasir, A., & Wiguna, M. (2014, October 2). Pengaruh Role Stress, Gender, Struktur Audit dan Profesionalisme terhadap. *JOM FEKON*.
- [6] Agustina, L. (2009). Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor Penelitian Kantor Akuntan Publik yang Bermitra Dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 40-69.
- [7] Fanani, Z., Hanif, R. A., & Subroto, B. (2008, Desember). Pengaruh Stuktur Audit, Konflik Peran, Dan Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5, 139-155.
- [8] Bowrin, A. (1998). Review and Synthesis of Auditing Structure Literature. *Journal of Accounting Literature* 17, 40-71.
- [9] Gayatri, K. D., & Suputra, I. D. (2016, May). Pengaruh Struktur Audit, Tekanan Waktu, Disiplin Kerja dan Komitmen Organisasi Pada Kinerja Auditor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1366-1391. doi:ISSN: 2302-8556
- [10] Krietner, R., & Kinicki, A. (2014). *Perilaku organisasi .Edisi Sembilan. Alih Bahasa: Biro Bahasa Alkemis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [11] Robbins, S. (2015). *Perilaku Organisasi: Edisi 16 (Terj). Penterjemah Saraswati, R, Sirait, F*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Rosally, C., & Jogi, Y. (2015). Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. *Business Accouting Review*, 3(2), 31-40.
- [13] Hery, S. (2017). *Auditing dan Asurans Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional (I ed.)*. Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi.
- [14] Firnanti, F., & Hanna, E. (2013, June). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 15(1), 13-28. doi:ISSN: 1410-9875
- [15] Wibowo. (2014). *Manajemen Kinerja* (keempat ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- [16] Yasa, I. (2017). Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Mediasi Stres Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar Bali. *AGADHITA: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 38-57.